



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FREDI NURCAHYA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3. NHK : 684456

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/225 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 144 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.500.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 558.354.832**F. HARTA LAINNYA** Rp. 688.200.000**Sub Total** Rp. 2.481.554.832**III. HUTANG** Rp. 250.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.231.554.832

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.